

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewujudkan Good Governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistik, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah, kemudian untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU No. 33 Tahun 2004 dan tentunya kedua UU ini erat kaitannya karena secara otomatis dengan adanya peralihan wewenang pemerintah dari pusat ke daerah maka harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan dari masing-masing daerah. Dengan kehadiran UU No. 33 Tahun 2004 telah membawa

dampak yang besar dan cukup mendasar dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam UU ini menyatakan antara lain bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokrasi menjadi satu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokrasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Mahmudi (2009) mengatakan bahwa Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Pada umumnya setiap instansi berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam kegiatan instansi, semua bagian seperti pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam proses pencapaian tujuan. Untuk mengkoordinasikan kegiatan instansi dalam mencapai tujuannya, maka setiap instansi senantiasa berusaha untuk menyusun strategi-trategi sebagai petunjuk dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerjanya.

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan.

Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini 2 disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran.

Berdasarkan dari kenyataan yang ada di lingkungan pemerintah, permasalahan yang sering timbul yaitu mengenai Rendahnya akuntabilitas anggaran publik, terutama jika disoroti dari proses perumusan APBD dan realisasinya, terbukti dari tiga fenomena pokok. Pertama, perumusan APBD sejauh ini masih di dikte oleh kepentingan politik para elit pejabat di daerah, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif. Akibatnya, kepentingan untuk memakmurkan rakyat seringkali terpinggirkan. Kedua, prioritas belanja daerah ternyata masih sangat dipengaruhi alokasi untuk gaji dan belanja pegawai, bukan untuk membuat program-program yang responsif bagi rakyat di daerah. Kecenderungan seperti ini sesungguhnya sudah ada sejak masa pemerintahan Orde Baru, di mana Subsidi Daerah Otonom selalu menyedot dana publik yang proporsinya begitu besar. Ketiga, kurangnya kemampuan perencanaan dan penganggaran diantara para pegawai Pemda dan semakin ketatnya ketentuan pengadaan barang dan jasa mengakibatkan semakin besarnya SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Akibatnya, sekali lagi semakin banyak dana APBD yang kurang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kemakmuran rakyat karena tidak bisa dibelanjakan secara efektif, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tersebut, terutama dengan melihat aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitasnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjalankan segala kegiatan instansi, maka dibutuhkan dana untuk membiayainya. Dalam hal ini kebutuhan dana dituangkan di dalam anggaran. Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan dalam membiayai seluruh kegiatan Instansi, sehingga sangat penting penyusunan anggaran dengan baik dalam rangka untuk membiayai operasional instansi dan untuk melihat sejauh mana anggaran biaya operasional dengan realisasinya.

Pada umumnya komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan perubahan equitas, laporan operasional dan catatan atas laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Berhubung anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam penyusunan APBN seharusnya digunakan struktur, definisi, dan basis yang sama

dengan yang digunakan dalam pelaporannya. Anggaran pemerintah disusun dengan basis kas. Akuntansi pemerintah pada dasarnya merupakan akuntansi anggaran, maka basis akuntansi yang digunakan seharusnya sama dengan basis anggaran.

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II Ciputat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyajikan laporan realisasi anggaran berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Penyusunan laporan realisasi anggaran BBMKG Wilayah II mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan realisasi anggaran ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan realisasi anggaran ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Ciputat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam penilaian kinerja dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Ciputat sangatlah penting, karena Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Ciputat tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan besar wilayah II dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan APBN. Analisis laporan realisasi anggaran dalam banyak hal mampu menyediakan indikator penting yang berhubungan dengan keadaan keuangan BBMKG Wilayah II, sehingga dapat dipakai sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama bagi Kepala BBMKG Wilayah II sebagai kuasa pengguna anggaran dalam rangka menilai efektifitas dan efisiensi kinerja Keuangan, menyusun rencana yang lebih baik, serta menentukan kebijaksanaan yang lebih tepat.

Terkait dengan uraian tersebut, berdasarkan data pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Ciputat menunjukkan bahwa realisasi belanja cenderung tidak efisien dan tidak sesuai dengan rencana yang di targetkan setiap bulan akan tetapi pendapatan pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Ciputat sangat efektif. Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah, yang difokuskan pada efektivitas pendapatan dan efisiensi anggran belanja. Pada akhirnya, diharapkan muncul beberapa saran konstruktif dalam upaya meningkatkan efektivitas pendapatan dan

efisiensi anggaran belanja negara dalam APBN. Melihat hal tersebut maka penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul:

“ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DI BALAI BESAR METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH II CIPUTAT“.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana kinerja keuangan pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II Ciputat diukur dari efektivitas realisasi anggaran pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- b) Bagaimana kinerja keuangan pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Ciputat diukur dari efisiensi realisasi anggaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui efektivitas kinerja keuangan dari realisasi anggaran pendapatan pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Ciputat.
- b) Untuk mengetahui efisiensi kinerja keuangan dari realisasi belanja pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Ciputat

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Bagi Instansi Terkait

Dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerja keuangan pada tahun-tahun berikutnya.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan membandingkannya dengan praktek yang terjadi di lapangan.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja yang dilakukan oleh di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Ciputat.

